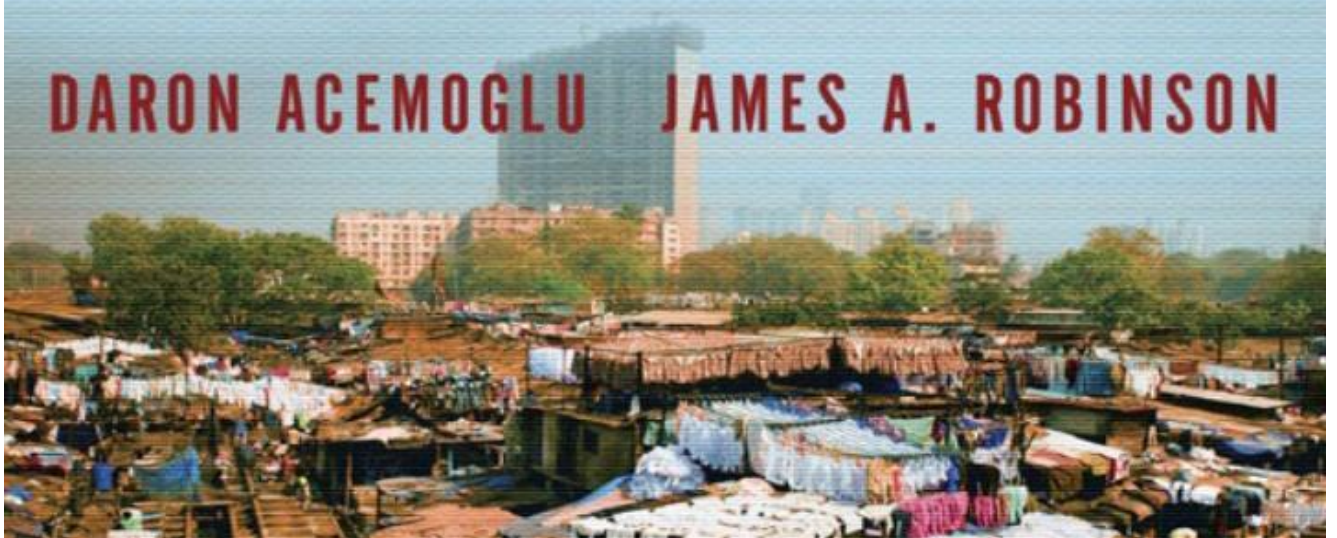


"Truly awesome . . . brilliant in its simplicity and power."—Steven Levitt, coauthor of *Freakonomics*

THE ORIGINS OF
POWER, PROSPERITY, AND POVERTY

WHY NATIONS FAIL

DARON ACEMOGLU JAMES A. ROBINSON



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

3 Juli 2026

Ringkasan Buku

Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty

Oleh: Daron Acemoglu dan James A. Robinson

1. Pendahuluan: Pertanyaan Besar tentang Kemakmuran dan Kemiskinan Bangsa

Buku *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty* karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson merupakan salah satu karya penting dalam ekonomi politik kelembagaan kontemporer. Buku ini berusaha menjawab pertanyaan besar yang telah lama menjadi perhatian para ekonom, sejarawan, ilmuwan politik, dan pembuat kebijakan: mengapa sebagian negara menjadi kaya, stabil, inovatif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sedangkan sebagian negara lain tetap miskin, rapuh, korup, otoriter, atau terjebak dalam konflik berkepanjangan?

Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya sangat kompleks. Selama berabad-abad, banyak teori diajukan untuk menjelaskan perbedaan kemakmuran antarbangsa. Ada teori yang menekankan faktor geografis, seperti iklim tropis, akses ke laut, tanah subur, atau keberadaan sumber daya alam. Ada pula teori budaya yang menyatakan bahwa nilai, etos kerja, agama, atau tradisi tertentu lebih mendukung kemajuan ekonomi. Teori lain menyoroti kurangnya pengetahuan para pemimpin, kesalahan kebijakan, atau kegagalan teknokratis sebagai penyebab kemiskinan.

Acemoglu dan Robinson menolak penjelasan-penjelasan tersebut sebagai faktor utama. Menurut mereka, faktor penentu yang paling mendasar bukanlah geografi, budaya, atau ketidaktahuan pemimpin, melainkan

kualitas institusi politik dan ekonomi. Bangsa menjadi maju ketika memiliki institusi yang inklusif, yaitu institusi yang membuka partisipasi luas, melindungi hak milik, memberi kepastian hukum, mendorong inovasi, membatasi kekuasaan sewenang-wenang, dan memungkinkan masyarakat luas memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi. Sebaliknya, bangsa gagal ketika dikuasai oleh institusi ekstraktif, yaitu institusi yang dirancang untuk mengambil kekayaan dari mayoritas penduduk demi keuntungan elite sempit.

Inti buku ini dapat dirumuskan dalam satu tesis besar: kemakmuran berkelanjutan lahir dari kombinasi institusi ekonomi inklusif dan institusi politik inklusif; sedangkan kemiskinan kronis, ketimpangan ekstrem, dan kegagalan negara lahir dari institusi ekstraktif yang memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada segelintir elite.

Buku ini bukan sekadar karya ekonomi pembangunan. Ia adalah sintesis antara sejarah ekonomi, ilmu politik, teori institusi, dan analisis kekuasaan. Para penulis menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan investasi, modal, teknologi, pendidikan, atau pasar. Semua faktor itu penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada struktur institusi yang mengatur siapa yang memiliki hak, siapa yang membuat keputusan, siapa yang mendapat insentif, siapa yang dilindungi hukum, dan siapa yang memiliki akses terhadap peluang.

2. Contoh Pembuka: Nogales dan Arti Institusi

Salah satu contoh paling terkenal dalam buku ini adalah kota Nogales. Nogales terbagi oleh perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Di sebelah utara terdapat Nogales, Arizona; di sebelah selatan terdapat Nogales, Sonora. Kedua wilayah ini memiliki geografi yang hampir sama, iklim yang sama, latar budaya yang mirip, dan penduduk yang secara historis memiliki hubungan sosial erat. Namun tingkat kesejahteraan keduanya sangat berbeda.

Di Nogales, Arizona, penduduk menikmati pendapatan lebih tinggi, layanan publik lebih baik, pendidikan lebih maju, kesehatan lebih terjamin,

dan sistem hukum lebih dapat diandalkan. Di Nogales, Sonora, kondisi sosial-ekonomi relatif tertinggal: pendapatan lebih rendah, layanan publik lebih lemah, keamanan lebih rentan, dan kesempatan ekonomi lebih terbatas.

Perbedaan tersebut, menurut Acemoglu dan Robinson, tidak dapat dijelaskan oleh geografi atau budaya, karena kedua sisi kota tersebut secara geografis dan kultural sangat mirip. Perbedaan utamanya adalah institusi. Nogales, Arizona berada dalam sistem institusi Amerika Serikat yang relatif lebih inklusif: hak milik lebih terlindungi, pemerintah lebih akuntabel, peluang usaha lebih terbuka, dan warga memiliki saluran politik yang lebih luas. Sementara itu, Nogales, Sonora berada dalam sejarah institusional Meksiko yang lebih panjang dipengaruhi oleh sentralisasi kekuasaan, patronase, ketimpangan, dan lemahnya kepastian hukum.

Contoh Nogales berfungsi sebagai pintu masuk ke argumen utama buku. Kemakmuran bukan terutama soal lokasi fisik, melainkan soal "aturan main" yang membentuk kehidupan ekonomi dan politik. Dua wilayah yang mirip secara alamiah dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan sangat berbeda karena berada dalam sistem institusi yang berbeda.

3. Institusi Inklusif dan Institusi Ekstraktif

Konsep utama dalam buku ini adalah perbedaan antara institusi inklusif dan institusi ekstraktif.

Institusi ekonomi inklusif adalah aturan, kebijakan, norma hukum, dan struktur organisasi yang memungkinkan banyak orang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Institusi seperti ini menjamin hak milik, membuka akses terhadap pendidikan, menciptakan pasar yang relatif kompetitif, memberi kesempatan bagi wirausaha, melindungi kontrak, dan menyediakan ruang bagi inovasi. Dalam institusi inklusif, masyarakat luas memiliki insentif untuk bekerja, menabung, berinvestasi, belajar, mencipta, dan mengambil risiko produktif karena hasil dari usaha mereka tidak mudah dirampas oleh penguasa atau kelompok elite.

Sebaliknya, institusi ekonomi ekstraktif dirancang untuk mengambil sumber daya dari banyak orang demi kepentingan segelintir kelompok. Dalam institusi seperti ini, hak milik tidak aman, pasar dikendalikan elite, monopoli diberikan kepada kroni, akses pendidikan dibatasi, tenaga kerja dipaksa atau dieksploitasi, dan hukum digunakan sebagai alat kekuasaan. Masyarakat tidak memiliki insentif kuat untuk berinovasi karena hasil kerja dan kreativitas mereka dapat diambil oleh penguasa.

Namun institusi ekonomi tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh institusi politik. Institusi politik inklusif adalah sistem politik yang mendistribusikan kekuasaan secara cukup luas, membatasi kekuasaan elite, memiliki mekanisme akuntabilitas, dan memberi ruang partisipasi kepada masyarakat. Demokrasi konstitusional, rule of law, pemilu yang relatif bebas, lembaga perwakilan, kebebasan sipil, dan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif merupakan contoh elemen institusi politik inklusif.

Institusi politik ekstraktif, sebaliknya, memusatkan kekuasaan pada individu, keluarga, partai, militer, oligarki, atau kelompok elite tertentu. Dalam sistem seperti ini, masyarakat tidak memiliki kontrol efektif terhadap penguasa. Kekuasaan politik digunakan untuk menciptakan kekayaan bagi elite, sedangkan institusi ekonomi dibentuk untuk mempertahankan dominasi mereka.

Hubungan antara institusi politik dan ekonomi bersifat saling memperkuat. Institusi politik inklusif cenderung melahirkan institusi ekonomi inklusif karena kekuasaan yang tersebar mencegah elite menggunakan negara semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Sebaliknya, institusi politik ekstraktif cenderung melahirkan institusi ekonomi ekstraktif karena elite politik memiliki kekuasaan untuk merancang aturan ekonomi yang menguntungkan dirinya.

4. Mengapa Geografi Bukan Jawaban Utama

Banyak teori pembangunan menekankan geografi. Negara tropis sering dianggap lebih miskin karena penyakit, tanah kurang produktif, iklim panas, atau hambatan transportasi. Negara yang terkurung daratan

dianggap lebih sulit berkembang dibanding negara maritim. Wilayah dengan sumber daya alam melimpah kadang dianggap lebih mudah kaya.

Acemoglu dan Robinson tidak menyangkal bahwa geografi dapat memengaruhi kondisi ekonomi. Namun mereka menolak anggapan bahwa geografi adalah penyebab utama perbedaan kemakmuran. Buktinya, banyak negara dengan geografi serupa memiliki tingkat kemakmuran berbeda. Korea Utara dan Korea Selatan berada pada semenanjung yang sama, memiliki latar budaya yang sama, dan sejarah panjang yang sama sebelum terpisah secara politik. Namun setelah Perang Korea, keduanya berkembang sangat berbeda. Korea Selatan menjadi negara industri maju, sedangkan Korea Utara tetap miskin dan tertutup. Perbedaannya bukan geografi, melainkan institusi politik dan ekonomi.

Contoh lain adalah Jerman Barat dan Jerman Timur pada masa Perang Dingin. Keduanya berasal dari bangsa yang sama, bahasa yang sama, dan tradisi budaya yang sama, tetapi mengalami perkembangan ekonomi berbeda karena berada dalam sistem institusi berbeda. Jerman Barat mengadopsi ekonomi pasar sosial dengan institusi demokratis, sedangkan Jerman Timur berada di bawah sistem komando sosialis otoriter.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa geografi tidak cukup menjelaskan keberhasilan atau kegagalan bangsa. Dalam banyak situasi, institusi dapat mengatasi hambatan geografis atau justru memperburuknya. Negara dengan sumber daya alam melimpah dapat tetap miskin jika sumber daya tersebut dikuasai elite ekstraktif. Sebaliknya, negara dengan sumber daya alam terbatas dapat menjadi kaya jika memiliki institusi yang mendorong pendidikan, inovasi, industri, perdagangan, dan akumulasi pengetahuan.

5. Mengapa Budaya Bukan Penjelasan Utama

Teori budaya menyatakan bahwa nilai-nilai tertentu membuat masyarakat lebih maju. Etos kerja, disiplin, kepercayaan sosial, agama, orientasi masa depan, atau budaya kewirausahaan sering disebut sebagai penyebab kemakmuran. Acemoglu dan Robinson mengakui bahwa budaya dapat

berpengaruh, tetapi mereka menolak budaya sebagai penyebab utama yang berdiri sendiri.

Masalah utama teori budaya adalah sulit menjelaskan perubahan cepat. Jika budaya adalah penyebab utama, bagaimana mungkin Korea Selatan berubah dari negara miskin menjadi negara industri maju dalam beberapa dekade, sementara Korea Utara yang memiliki akar budaya sama tetap tertinggal? Bagaimana mungkin masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur, yang memiliki budaya historis sama, menunjukkan kinerja ekonomi berbeda selama masa pemisahan politik?

Menurut buku ini, budaya sering kali merupakan akibat dari institusi, bukan penyebab utama. Institusi membentuk insentif, dan insentif membentuk perilaku. Ketika masyarakat hidup dalam sistem hukum yang adil, hak milik terlindungi, pendidikan tersedia, dan peluang ekonomi terbuka, maka perilaku seperti kerja keras, kepercayaan, inovasi, dan kewirausahaan lebih mudah berkembang. Sebaliknya, dalam institusi ekstraktif, masyarakat mungkin tampak "tidak produktif" bukan karena budaya mereka malas, tetapi karena sistem tidak memberi penghargaan pada produktivitas.

Dengan demikian, budaya tidak diabaikan, tetapi ditempatkan sebagai faktor sekunder. Budaya penting, tetapi ia tidak cukup menjelaskan mengapa bangsa gagal atau berhasil. Yang lebih menentukan adalah bagaimana institusi menciptakan struktur kesempatan dan insentif.

6. Mengapa Ketidaktahuan Pemimpin Bukan Penyebab Utama

Teori lain menyatakan bahwa negara miskin karena pemimpinnya tidak tahu kebijakan yang benar. Jika pemimpin memahami ilmu ekonomi modern, mereka akan membuat kebijakan yang lebih baik dan negara akan maju. Acemoglu dan Robinson menyebut ini sebagai "ignorance hypothesis" atau hipotesis ketidaktahuan.

Mereka menolak hipotesis ini sebagai penjelasan utama. Menurut mereka, banyak pemimpin negara miskin bukan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan, melainkan tidak mau melakukannya karena kebijakan inklusif dapat mengancam kekuasaan mereka. Reformasi yang memperkuat hak

milik, membuka kompetisi, memberantas monopoli, memperluas pendidikan, dan membangun akuntabilitas sering kali merugikan elite yang selama ini menikmati institusi ekstraktif.

Misalnya, seorang diktator mungkin memahami bahwa pendidikan luas akan meningkatkan produktivitas nasional. Namun pendidikan juga dapat membuat rakyat lebih kritis, lebih mampu berorganisasi, dan lebih sulit dikendalikan. Karena itu, elite ekstraktif mungkin sengaja membatasi pendidikan bukan karena tidak tahu manfaat pendidikan, tetapi karena takut kehilangan kontrol politik.

Demikian pula, elite yang menguasai monopoli ekonomi mungkin tahu bahwa kompetisi akan meningkatkan efisiensi nasional. Namun kompetisi akan mengurangi keuntungan pribadi mereka. Karena itu, mereka mempertahankan monopoli meskipun merugikan masyarakat luas.

Argumen ini penting karena menggeser fokus dari persoalan teknokratis ke persoalan politik. Kegagalan pembangunan bukan semata-mata akibat salah desain kebijakan, tetapi akibat konflik kepentingan antara masyarakat luas dan elite yang berkuasa. Kebijakan buruk sering kali bertahan bukan karena tidak ada pengetahuan, melainkan karena menguntungkan kelompok yang memiliki kekuasaan.

7. Lingkaran Kebaikan dan Lingkaran Kejahatan Institusi

Buku ini menjelaskan bahwa institusi memiliki kecenderungan untuk mereproduksi dirinya sendiri. Institusi inklusif dapat menciptakan "virtuous circle" atau lingkaran kebaikan. Sebaliknya, institusi ekstraktif dapat menciptakan "vicious circle" atau lingkaran kejahatan.

Lingkaran kebaikan terjadi ketika institusi politik inklusif membatasi kekuasaan elite, memperkuat rule of law, melindungi hak milik, dan mendorong partisipasi luas. Keberhasilan ekonomi yang dihasilkan kemudian memperkuat masyarakat sipil, memperluas kelas menengah, meningkatkan pendidikan, dan menciptakan tuntutan lebih besar terhadap akuntabilitas. Dengan demikian, institusi inklusif menjadi semakin kuat.

Sebaliknya, lingkaran kejahatan terjadi ketika institusi ekstraktif memusatkan kekuasaan dan kekayaan. Elite menggunakan kekayaan untuk mempertahankan kekuasaan politik, dan menggunakan kekuasaan politik untuk memperoleh lebih banyak kekayaan. Ketimpangan meningkat, oposisi ditekan, hukum dikendalikan, dan peluang masyarakat dibatasi. Bahkan ketika terjadi pergantian rezim, struktur ekstraktif sering tetap bertahan karena elite baru menggantikan elite lama tanpa mengubah aturan dasar permainan.

Inilah sebabnya banyak negara mengalami perubahan pemimpin tetapi tidak mengalami perubahan institusional. Revolusi, kudeta, atau pemilu dapat mengganti aktor, tetapi jika struktur kekuasaan tetap ekstraktif, hasilnya tidak jauh berbeda. Buku ini menekankan bahwa perubahan sejati bukan hanya pergantian elite, melainkan transformasi institusi.

8. Critical Juncture dan Perubahan Sejarah

Meskipun institusi cenderung bertahan, Acemoglu dan Robinson tidak melihat sejarah sebagai sesuatu yang sepenuhnya deterministik. Perubahan dapat terjadi melalui apa yang mereka sebut sebagai "critical junctures" atau titik balik kritis. Titik balik kritis adalah peristiwa besar yang mengguncang struktur sosial, ekonomi, atau politik, sehingga membuka kemungkinan perubahan institusional.

Contohnya adalah Black Death di Eropa pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sebagian besar penduduk Eropa dan mengubah keseimbangan kekuasaan antara tuan tanah dan petani. Di Eropa Barat, kelangkaan tenaga kerja membuat petani memiliki posisi tawar lebih kuat. Sistem feodalisme melemah, dan dalam jangka panjang hal ini berkontribusi pada perkembangan institusi yang lebih inklusif. Di Eropa Timur, elite tuan tanah justru memperketat kontrol atas petani, sehingga institusi ekstraktif bertahan lebih lama.

Contoh ini menunjukkan bahwa peristiwa yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda tergantung pada kondisi institusional awal dan keseimbangan kekuasaan. Critical juncture tidak otomatis menghasilkan

kemajuan. Ia hanya membuka peluang. Arah perubahan bergantung pada siapa yang mampu memanfaatkan peluang tersebut dan bagaimana konflik politik diselesaikan.

Titik balik kritis lain adalah Revolusi Industri, kolonialisme Eropa, Revolusi Glorious di Inggris, kemerdekaan negara-negara jajahan, krisis ekonomi, perang, dan transisi demokrasi. Setiap peristiwa besar dapat memperkuat institusi inklusif atau justru memperdalam institusi ekstraktif.

9. The Glorious Revolution dan Akar Kemajuan Inggris

Salah satu contoh terpenting dalam buku ini adalah Glorious Revolution di Inggris pada tahun 1688. Menurut Acemoglu dan Robinson, peristiwa ini merupakan titik balik penting yang membuka jalan bagi institusi politik dan ekonomi lebih inklusif di Inggris.

Sebelum Glorious Revolution, raja memiliki kekuasaan besar untuk memungut pajak, memberikan monopoli, mengendalikan perdagangan, dan membatasi hak-hak ekonomi. Setelah Glorious Revolution, kekuasaan monarki dibatasi oleh Parlemen. Hal ini memperkuat kepastian hukum, melindungi hak milik, dan mengurangi risiko perampasan oleh penguasa.

Pembatasan kekuasaan raja membuka ruang bagi kelompok pedagang, pengusaha, dan inovator. Mereka memiliki insentif lebih besar untuk berinvestasi karena hak mereka lebih aman. Institusi keuangan berkembang, pasar modal tumbuh, dan negara lebih mampu menyediakan infrastruktur publik. Dalam jangka panjang, perubahan ini berkontribusi pada Revolusi Industri.

Bagi Acemoglu dan Robinson, Revolusi Industri bukan sekadar hasil penemuan mesin uap atau kemajuan teknologi. Teknologi dapat berkembang dan menyebar karena ada institusi yang memberi insentif kepada inovator. Tanpa hak paten, pasar kompetitif, modal, kebebasan bergerak, dan perlindungan hukum, inovasi tidak akan menghasilkan transformasi ekonomi luas.

Dengan kata lain, Inggris menjadi pelopor Revolusi Industri bukan karena orang Inggris secara budaya lebih cerdas atau karena geografinya paling unggul, melainkan karena institusinya secara bertahap menjadi lebih inklusif dibanding banyak negara lain pada waktu itu.

10. Creative Destruction: Inovasi yang Mengancam Elite Lama

Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah "creative destruction," yaitu proses ketika inovasi menciptakan teknologi, industri, dan cara kerja baru sekaligus menghancurkan struktur ekonomi lama. Konsep ini sebelumnya dikenal dalam pemikiran Joseph Schumpeter, tetapi Acemoglu dan Robinson menggunakannya untuk menjelaskan mengapa elite ekstraktif sering menolak perubahan.

Inovasi ekonomi tidak pernah netral secara politik. Teknologi baru dapat menciptakan kelompok kaya baru, memperlemah monopoli lama, menggeser kekuasaan ekonomi, dan akhirnya mengubah keseimbangan politik. Karena itu, elite yang berkuasa dalam institusi ekstraktif sering takut terhadap inovasi. Mereka tidak hanya takut kehilangan keuntungan ekonomi, tetapi juga takut kehilangan dominasi politik.

Contohnya, penguasa yang mengendalikan ekonomi agraris tradisional mungkin menolak industrialisasi karena industrialisasi menciptakan kelas pekerja kota, pengusaha baru, serikat pekerja, dan kelompok sosial yang lebih sulit dikendalikan. Pemilik monopoli lama menolak kompetisi karena kompetisi mengancam keuntungan mereka. Rezim otoriter membatasi media dan teknologi informasi karena teknologi tersebut dapat memperluas kesadaran politik masyarakat.

Creative destruction adalah mesin kemajuan dalam institusi inklusif, tetapi menjadi ancaman dalam institusi ekstraktif. Negara maju adalah negara yang mampu membiarkan inovasi mengganggu struktur lama secara produktif. Negara gagal adalah negara yang elite-nya berhasil menekan inovasi demi mempertahankan status quo.

11. Kolonialisme dan Pembentukan Institusi Ekstraktif

Buku ini memberikan perhatian besar pada dampak kolonialisme terhadap institusi negara-negara modern. Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa kolonialisme Eropa tidak menghasilkan pola institusi yang sama di semua wilayah. Di beberapa tempat, kolonialisme menciptakan institusi yang relatif inklusif; di tempat lain, kolonialisme menciptakan institusi sangat ekstraktif.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh strategi kolonial. Di wilayah yang dianggap cocok untuk permukiman Eropa, seperti Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru, kolonialis cenderung membangun institusi yang melindungi hak milik, menyediakan perwakilan politik lokal, dan menciptakan insentif ekonomi bagi pemukim. Walaupun tetap ada kekerasan terhadap penduduk asli, institusi untuk komunitas pemukim berkembang relatif inklusif.

Sebaliknya, di wilayah yang kaya sumber daya atau memiliki penduduk lokal padat yang dapat dieksploitasi, kolonialis cenderung membangun institusi ekstraktif. Tujuannya adalah mengambil emas, perak, hasil pertanian, tenaga kerja, atau pajak dari penduduk lokal. Contohnya adalah sistem kerja paksa dan ekstraksi sumber daya di Amerika Latin, Afrika, dan sebagian Asia.

Warisan kolonial ini sangat penting karena setelah kemerdekaan, banyak negara tidak mengubah institusi ekstraktif tersebut. Elite lokal mengambil alih posisi kolonial dan menggunakan negara untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam banyak kasus, kolonialisme meninggalkan struktur sentralisasi kekuasaan, ketimpangan tanah, birokrasi represif, dan ekonomi berbasis ekstraksi yang terus bertahan setelah penjajah pergi.

Namun buku ini juga menekankan bahwa warisan kolonial bukan takdir mutlak. Negara dapat mengubah institusinya, tetapi perubahan itu membutuhkan konflik politik, koalisi sosial, dan reformasi yang tidak mudah.

12. Amerika Latin: Kekayaan yang Diekstraksi

Amerika Latin menjadi salah satu contoh penting dalam buku ini. Spanyol dan Portugis membangun sistem kolonial yang sangat ekstraktif di wilayah tersebut. Kekayaan alam, terutama emas dan perak, dieksploitasi melalui kerja paksa dan struktur sosial yang sangat hierarkis. Penduduk asli dipaksa bekerja, tanah dikuasai elite, dan kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok kecil.

Setelah kemerdekaan, banyak negara Amerika Latin tidak langsung menjadi inklusif. Struktur ekonomi dan politik kolonial berlanjut dalam bentuk baru. Elite lokal menggantikan elite kolonial, tetapi pola kekuasaan tetap mirip: tanah terkonsentrasi, hak politik terbatas, pendidikan tidak merata, dan negara sering menjadi alat kepentingan oligarki.

Meksiko menjadi contoh yang sering dibahas. Sejarah Meksiko menunjukkan bagaimana kekuasaan politik yang terpusat dan jaringan patronase dapat menghambat kompetisi ekonomi. Monopoli, korupsi, dan hubungan dekat antara bisnis dan politik melemahkan inovasi serta membatasi peluang masyarakat luas.

Argentina juga menjadi kasus menarik. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Argentina pernah termasuk negara kaya. Namun institusinya tidak cukup inklusif untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Ketimpangan politik, konflik elite, populisme, dan ketidakstabilan institusional menghambat pembangunan berkelanjutan.

Pesan utama dari contoh Amerika Latin adalah bahwa kekayaan sumber daya atau kemakmuran awal tidak cukup. Tanpa institusi inklusif, pertumbuhan dapat rapuh, timpang, dan mudah mengalami kemunduran.

13. Afrika: Dari Ekstraksi Kolonial ke Ekstraksi Pasca-Kolonial

Buku ini juga membahas banyak contoh dari Afrika, seperti Sierra Leone, Kongo, Zimbabwe, dan Botswana. Banyak negara Afrika mengalami kolonialisme yang sangat ekstraktif. Kolonialis membangun negara bukan untuk menyediakan layanan publik atau menciptakan ekonomi inklusif, tetapi untuk mengambil sumber daya alam, tenaga kerja, dan pajak.

Di Kongo, eksploitasi brutal pada masa kolonial Belgia meninggalkan institusi yang sangat lemah dan ekstraktif. Setelah kemerdekaan, struktur negara tetap digunakan untuk ekstraksi. Kekuasaan politik menjadi jalan utama untuk menguasai kekayaan. Negara tidak berfungsi sebagai penyedia hukum dan layanan publik, melainkan sebagai alat perebutan rente.

Sierra Leone mengalami pola serupa. Sumber daya berlian menjadi kutukan karena institusi politik tidak mampu mengelola kekayaan tersebut untuk kepentingan rakyat. Berlian justru memicu konflik, korupsi, dan perebutan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa sumber daya alam tanpa institusi inklusif dapat memperburuk kegagalan negara.

Zimbabwe di bawah Robert Mugabe menjadi contoh bagaimana gerakan pembebasan dapat berubah menjadi rezim ekstraktif. Setelah kemerdekaan, harapan demokrasi dan pembangunan berubah menjadi konsentrasi kekuasaan, represi politik, perampasan, dan kehancuran ekonomi.

Namun Afrika juga memiliki contoh positif, yaitu Botswana. Botswana berhasil membangun institusi yang relatif lebih inklusif setelah kemerdekaan. Kepemimpinan politiknya lebih menahan diri dalam menggunakan kekuasaan, hak milik relatif dilindungi, dan pendapatan dari berlian dikelola lebih baik dibanding banyak negara Afrika lain. Botswana menunjukkan bahwa negara Afrika tidak ditakdirkan gagal oleh geografi atau budaya. Dengan institusi yang lebih baik, pembangunan dapat terjadi.

14. Asia: Korea, Cina, dan Jalur Pembangunan yang Berbeda

Korea menjadi contoh kuat dalam buku ini. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki sejarah, bahasa, dan budaya yang sama, tetapi setelah terpisah, keduanya mengembangkan institusi sangat berbeda. Korea Utara membangun institusi politik totaliter dan ekonomi komando ekstraktif. Negara mengendalikan hampir seluruh kehidupan ekonomi, menekan kebebasan, dan memusatkan kekuasaan pada elite rezim. Hasilnya adalah kemiskinan, kelaparan, represi, dan stagnasi.

Korea Selatan pada awalnya juga tidak sepenuhnya demokratis. Namun institusi ekonominya secara bertahap memberi ruang bagi industrialisasi, pendidikan, ekspor, dan inovasi. Seiring pertumbuhan ekonomi, muncul kelas menengah dan tekanan demokratisasi. Pada akhirnya, Korea Selatan bergerak menuju institusi politik yang lebih inklusif dan menjadi negara maju.

Cina merupakan kasus yang lebih kompleks. Buku ini mengakui bahwa Cina mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat sejak reformasi Deng Xiaoping. Reformasi pasar, pembukaan ekonomi, investasi, industrialisasi, dan integrasi global telah mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan. Namun Acemoglu dan Robinson skeptis terhadap keberlanjutan pertumbuhan Cina jika institusi politik tetap ekstraktif.

Menurut mereka, pertumbuhan di bawah institusi politik ekstraktif mungkin terjadi, terutama ketika negara melakukan mobilisasi sumber daya, mengejar ketertinggalan teknologi, atau membuka sebagian ruang ekonomi. Uni Soviet juga pernah tumbuh cepat melalui industrialisasi paksa. Namun pertumbuhan semacam itu memiliki batas karena kurangnya kebebasan, lemahnya creative destruction, kontrol politik yang ketat, dan risiko salah alokasi sumber daya.

Argumen ini tidak berarti Cina pasti gagal dalam waktu singkat. Pesannya lebih konseptual: pertumbuhan jangka panjang yang berbasis inovasi memerlukan institusi yang memberi ruang pada kebebasan berpikir, kompetisi, eksperimen, kritik, dan perlindungan hak. Jika politik terlalu menekan masyarakat dan pasar, inovasi dapat terhambat.

15. Uni Soviet: Pertumbuhan Ekstraktif yang Tidak Berkelanjutan

Uni Soviet menjadi contoh utama pertumbuhan di bawah institusi ekstraktif. Pada abad ke-20, Uni Soviet berhasil melakukan industrialisasi cepat, membangun industri berat, meningkatkan pendidikan teknis, dan menjadi kekuatan militer besar. Banyak pengamat pada masanya percaya bahwa model Soviet dapat menyaingi atau bahkan melampaui kapitalisme Barat.

Namun Acemoglu dan Robinson menjelaskan bahwa pertumbuhan Soviet bersifat terbatas. Negara dapat memobilisasi tenaga kerja dan modal secara paksa, memindahkan sumber daya dari pertanian ke industri, dan mengejar produksi besar-besaran. Tetapi sistem tersebut tidak mampu menciptakan inovasi berkelanjutan. Tanpa insentif individu, kebebasan ekonomi, kompetisi, dan mekanisme informasi pasar, ekonomi Soviet menjadi tidak efisien.

Pertumbuhan ekstraktif dapat menghasilkan kemajuan awal, terutama ketika negara masih jauh dari batas teknologi global. Namun begitu ekonomi membutuhkan inovasi kompleks, fleksibilitas, kreativitas, dan adaptasi, institusi ekstraktif menjadi hambatan. Uni Soviet akhirnya mengalami stagnasi dan runtuh.

Pelajaran dari kasus Soviet adalah bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak selalu menunjukkan institusi inklusif. Pertumbuhan dapat terjadi di bawah paksaan, eksploitasi, atau mobilisasi negara. Pertanyaan pentingnya adalah apakah pertumbuhan itu berkelanjutan, inovatif, dan meningkatkan kebebasan masyarakat luas.

16. Kegagalan Negara Bukan Ketidadaan Negara Semata

Banyak orang mengira kegagalan negara terjadi karena negara terlalu lemah. Buku ini menunjukkan bahwa masalahnya lebih rumit. Di beberapa negara, negara memang lemah dan tidak mampu menyediakan keamanan, hukum, atau layanan publik. Namun dalam banyak kasus, negara justru cukup kuat untuk menindas rakyat, memungut rente, dan melindungi elite, tetapi terlalu lemah atau tidak mau melayani kepentingan umum.

Dengan kata lain, masalahnya bukan hanya kapasitas negara, melainkan tujuan penggunaan kapasitas negara. Negara ekstraktif dapat memiliki aparat keamanan kuat tetapi pendidikan buruk. Ia dapat memiliki birokrasi pajak represif tetapi layanan kesehatan lemah. Ia dapat membangun istana, proyek mercusuar, atau militer besar, tetapi gagal menyediakan infrastruktur dasar bagi rakyat.

Acemoglu dan Robinson menekankan bahwa negara yang berhasil membutuhkan dua hal sekaligus: kapasitas negara dan kontrol masyarakat atas negara. Negara harus cukup kuat untuk menegakkan hukum, menyediakan barang publik, dan menjaga ketertiban. Namun negara juga harus dibatasi agar tidak menjadi alat ekstraksi elite. Kombinasi ini merupakan inti institusi politik inklusif.

Negara yang terlalu lemah akan jatuh ke anarki. Negara yang terlalu kuat tanpa akuntabilitas akan jatuh ke tirani. Pembangunan memerlukan keseimbangan antara kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan.

17. Mengapa Reformasi Sulit Dilakukan

Salah satu pelajaran penting dari buku ini adalah bahwa reformasi institusional sangat sulit karena menyentuh distribusi kekuasaan. Reformasi bukan hanya soal membuat kebijakan lebih efisien, tetapi soal mengubah siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang kehilangan privilese.

Elite ekstraktif memiliki insentif kuat untuk menolak reformasi. Mereka dapat menggunakan uang, media, aparat, hukum, patronase, atau kekerasan untuk mempertahankan posisi. Masyarakat luas mungkin menginginkan perubahan, tetapi sering menghadapi masalah koordinasi. Mereka tersebar, kurang informasi, takut represi, atau tidak memiliki organisasi politik yang kuat.

Bahkan ketika reformasi berhasil dimulai, ada risiko pembajakan. Elite lama dapat beradaptasi dan menguasai institusi baru. Elite baru dapat mengatasnamakan reformasi tetapi kemudian menciptakan ekstraksi baru. Demokrasi formal dapat berubah menjadi oligarki elektoral jika pemilu dikendalikan uang, media, patronase, dan disinformasi.

Karena itu, perubahan institusional membutuhkan koalisi sosial luas, kepemimpinan reformis, tekanan masyarakat sipil, rule of law, media bebas, pendidikan politik, dan mekanisme akuntabilitas yang berkelanjutan.

18. Demokrasi dan Inklusivitas: Tidak Selalu Identik, tetapi Berkaitan

Buku ini sering diasosiasikan dengan pembelaan terhadap demokrasi, tetapi argumennya lebih spesifik. Demokrasi formal tidak otomatis menciptakan institusi inklusif. Banyak negara memiliki pemilu, tetapi tetap ekstraktif karena kekuasaan ekonomi dan politik dikuasai oligarki, hukum tidak independen, korupsi sistemik, dan partisipasi rakyat hanya prosedural.

Namun dalam jangka panjang, institusi politik inklusif sulit dibayangkan tanpa bentuk partisipasi politik yang luas. Demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural, memberi masyarakat kesempatan untuk mengontrol elite. Ia memungkinkan pergantian kekuasaan, koreksi kebijakan, kebebasan berserikat, kritik publik, dan perlindungan hak.

Dengan demikian, demokrasi perlu dilihat sebagai proses institusional, bukan hanya ritual pemilu. Demokrasi yang inklusif membutuhkan rule of law, checks and balances, kebebasan pers, peradilan independen, partai politik yang sehat, birokrasi profesional, dan masyarakat sipil aktif.

Dalam konteks ini, pembangunan politik dan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Ekonomi inklusif memerlukan politik yang membatasi ekstraksi; politik inklusif memerlukan basis ekonomi masyarakat yang cukup kuat agar warga dapat berpartisipasi secara bermakna.

19. Kegagalan Elite dan Bahaya Oligarki

Salah satu tema kuat dalam *Why Nations Fail* adalah bahaya oligarki. Oligarki muncul ketika kekayaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang kemudian menggunakan kekayaan tersebut untuk memengaruhi politik. Jika tidak dikendalikan, oligarki dapat mengubah negara menjadi alat perlindungan kepentingan mereka.

Oligarki dapat bekerja melalui banyak cara: monopoli bisnis, pembiayaan politik, penguasaan media, koneksi birokrasi, pengaruh atas hukum, pemberian izin, penguasaan tanah, atau akses khusus terhadap proyek negara. Oligarki tidak selalu anti-pasar; sering kali mereka mendukung pasar sejauh pasar itu menguntungkan mereka, tetapi menolak kompetisi yang dapat mengancam posisi mereka.

Buku ini membantu membedakan antara kapitalisme kompetitif dan kapitalisme kroni. Kapitalisme kompetitif dapat menjadi bagian dari institusi inklusif jika hak milik terlindungi, pasar terbuka, hukum adil, dan inovasi dihargai. Kapitalisme kroni adalah bentuk institusi ekstraktif karena keuntungan diperoleh melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui produktivitas.

Dalam banyak negara berkembang, persoalan utama bukan kurangnya pengusaha, melainkan struktur ekonomi-politik yang membuat pengusaha independen sulit tumbuh tanpa hubungan patronase. Hal ini menghambat inovasi dan memperlebar ketimpangan.

20. Pendidikan, Pengetahuan, dan Institusi

Pendidikan memiliki posisi penting dalam buku ini, meskipun bukan satu-satunya faktor. Institusi inklusif cenderung memperluas akses pendidikan karena masyarakat luas dipandang sebagai sumber produktivitas dan inovasi. Pendidikan meningkatkan kemampuan warga untuk bekerja, berwirausaha, mencipta teknologi, dan berpartisipasi dalam politik.

Sebaliknya, institusi ekstraktif sering membatasi pendidikan. Elite ekstraktif tidak selalu membutuhkan rakyat yang terdidik; mereka membutuhkan tenaga kerja patuh atau sumber daya yang dapat dieksploitasi. Pendidikan luas dapat mengancam dominasi elite karena menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan menuntut akuntabilitas.

Namun pendidikan saja tidak cukup jika institusi tetap ekstraktif. Lulusan terdidik tidak akan produktif jika pasar kerja dikendalikan patronase, korupsi tinggi, inovasi ditekan, dan hak milik tidak aman. Banyak negara memiliki universitas, tetapi gagal menciptakan ekonomi inovatif karena institusi politik dan ekonominya tidak memberi ruang bagi kreativitas dan kompetisi.

Pendidikan memerlukan ekosistem institusional: kebebasan akademik, meritokrasi, pasar tenaga kerja terbuka, perlindungan hukum, dan kesempatan sosial. Tanpa itu, pendidikan dapat berubah menjadi sekadar sertifikasi formal tanpa transformasi produktif.

21. Teknologi dan Inovasi: Siapa yang Diuntungkan?

Buku ini menegaskan bahwa teknologi adalah sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi teknologi tidak berkembang dalam ruang kosong. Inovasi membutuhkan insentif dan perlindungan. Penemu, ilmuwan, pengusaha, dan pekerja kreatif perlu percaya bahwa usaha mereka akan dihargai. Mereka memerlukan akses pada modal, pendidikan, jaringan, pasar, dan hukum yang melindungi hasil kerja mereka.

Dalam institusi inklusif, teknologi menyebar lebih luas karena masyarakat memiliki kesempatan untuk mengadopsi dan mengembangkan inovasi. Dalam institusi ekstraktif, teknologi sering dikontrol, dibatasi, atau digunakan hanya untuk memperkuat elite. Teknologi digital, misalnya, dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat jika didukung kebebasan informasi dan kompetisi. Namun ia juga dapat menjadi alat pengawasan dan kontrol jika dikuasai rezim ekstraktif.

Dengan demikian, buku ini relevan untuk era AI dan transformasi digital. Pertanyaan penting bukan hanya apakah suatu negara memiliki teknologi canggih, tetapi apakah institusinya memungkinkan teknologi tersebut meningkatkan kesejahteraan luas atau hanya memperkuat konsentrasi kekuasaan. AI dapat menjadi mesin inklusi jika memperluas akses pendidikan, kesehatan, produktivitas UMKM, dan layanan publik. Namun AI juga dapat menjadi alat ekstraksi jika memperkuat monopoli data, pengawasan, manipulasi informasi, dan ketimpangan akses.

22. Mengapa Bantuan Luar Negeri Sering Gagal

Acemoglu dan Robinson juga skeptis terhadap gagasan bahwa kemiskinan dapat diatasi terutama melalui bantuan luar negeri. Mereka tidak mengatakan bahwa bantuan selalu buruk, tetapi menilai bahwa bantuan sering gagal karena tidak mengubah institusi dasar.

Jika negara penerima bantuan dikuasai institusi ekstraktif, dana bantuan dapat diserap oleh elite, dikorupsi, digunakan untuk memperkuat patronase, atau menggantikan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Bantuan teknis juga sering tidak efektif jika masalah utama bukan kurangnya pengetahuan, melainkan distribusi kekuasaan.

Misalnya, membangun sekolah tidak cukup jika guru direkrut melalui patronase, anggaran dikorupsi, kurikulum tidak relevan, dan anak miskin tidak memiliki akses. Membangun jalan tidak cukup jika proyek infrastruktur menjadi sumber rente. Memberi dana kesehatan tidak cukup jika birokrasi pelayanan publik tidak akuntabel.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa bantuan pembangunan harus memperhatikan institusi. Program pembangunan yang tidak memahami politik lokal berisiko memperkuat struktur ekstraktif yang sudah ada.

23. Kritik terhadap Determinisme dan Optimisme Berlebihan

Walaupun buku ini sangat kuat dalam menjelaskan peran institusi, ia juga sering dikritik. Salah satu kritik adalah bahwa konsep "institusi inklusif" dan "institusi ekstraktif" terlalu luas. Hampir semua hal yang baik dapat disebut inklusif, dan semua hal yang buruk dapat disebut ekstraktif. Akibatnya, teori ini kadang dianggap sulit diuji secara ketat.

Kritik lain menyatakan bahwa buku ini terlalu menekankan politik domestik dan kurang memberi perhatian pada struktur global, seperti imperialisme, kapitalisme dunia, ketergantungan perdagangan, sistem keuangan internasional, dan relasi geopolitik. Negara miskin tidak hanya dibentuk oleh institusi internal, tetapi juga oleh posisi mereka dalam ekonomi global.

Ada pula kritik bahwa beberapa negara otoriter mampu tumbuh lama, sehingga hubungan antara institusi politik inklusif dan pertumbuhan tidak selalu linear. Cina, Singapura, Vietnam, dan beberapa negara Teluk sering diajukan sebagai contoh bahwa institusi politik tidak selalu harus demokratis liberal untuk menghasilkan pertumbuhan.

Namun kekuatan buku ini bukan pada klaim bahwa semua negara demokratis pasti maju atau semua negara otoriter pasti gagal segera. Kekuatan utamanya adalah penekanan bahwa pertumbuhan jangka

panjang yang inovatif, adaptif, dan luas membutuhkan pembatasan kekuasaan, perlindungan hak, dan partisipasi masyarakat. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekstraktif mungkin terjadi; dalam jangka panjang, ia menghadapi risiko stagnasi, krisis legitimasi, dan ketidakmampuan berinovasi.

24. Relevansi bagi Negara Berkembang

Bagi negara berkembang, buku ini memberikan pelajaran penting. Pembangunan tidak cukup dilakukan dengan mengejar pertumbuhan Produk Domestik Bruto, menarik investasi, membangun infrastruktur, atau memperluas ekspor. Semua itu penting, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka institusi yang inklusif.

Negara berkembang sering menghadapi paradoks: mereka membutuhkan negara yang kuat untuk mempercepat pembangunan, tetapi negara yang kuat dapat berubah menjadi alat ekstraksi jika tidak dikontrol. Mereka membutuhkan investasi besar, tetapi investasi dapat berubah menjadi rente jika proses perizinan, pengadaan, dan regulasi dikuasai elite. Mereka membutuhkan industrialisasi, tetapi industrialisasi dapat timpang jika hanya menguntungkan konglomerat tertentu. Mereka membutuhkan stabilitas politik, tetapi stabilitas dapat menjadi dalih untuk membatasi kritik dan partisipasi.

Karena itu, pembangunan membutuhkan keseimbangan antara efektivitas negara dan akuntabilitas publik. Negara harus mampu merancang kebijakan, menyediakan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga hukum, dan memfasilitasi inovasi. Namun negara juga harus transparan, tunduk pada hukum, terbuka terhadap kritik, dan tidak dikuasai oligarki.

25. Relevansi bagi Indonesia

Buku ini sangat relevan untuk membaca tantangan Indonesia. Indonesia adalah negara dengan potensi besar: jumlah penduduk besar, sumber daya alam melimpah, posisi strategis, keragaman budaya, pasar domestik luas, dan kelas menengah yang berkembang. Namun potensi tidak otomatis

menjadi kemakmuran. Pertanyaannya adalah apakah institusi politik dan ekonomi mampu mengubah potensi itu menjadi kesejahteraan inklusif.

Dalam perspektif *Why Nations Fail*, tantangan Indonesia bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi kualitas institusi. Beberapa isu penting dapat dibaca melalui kerangka ini.

Pertama, pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan alam dapat menjadi berkah jika dikelola melalui institusi transparan, akuntabel, dan berpihak pada nilai tambah nasional. Namun ia dapat menjadi sumber ekstraksi jika izin, konsesi, rente, dan keuntungan terkonsentrasi pada elite ekonomi-politik. Hilirisasi, misalnya, dapat menjadi strategi inklusif jika memperluas kapasitas industri nasional, menciptakan pekerjaan bermutu, memperkuat teknologi domestik, dan menjaga lingkungan. Namun hilirisasi dapat menjadi ekstraktif jika hanya memindahkan rente dari ekspor bahan mentah ke oligopoli industri tanpa pemerataan manfaat.

Kedua, birokrasi dan pelayanan publik. Institusi inklusif memerlukan birokrasi yang profesional, meritokratis, dan berorientasi pelayanan. Jika birokrasi terlalu dipengaruhi patronase, korupsi, atau kepentingan politik jangka pendek, maka kebijakan publik sulit efektif. Reformasi birokrasi bukan hanya soal digitalisasi, tetapi soal perubahan insentif, akuntabilitas, dan budaya pelayanan.

Ketiga, pendidikan dan SDM. Indonesia memerlukan pendidikan yang membuka mobilitas sosial. Dalam kerangka Acemoglu dan Robinson, pendidikan adalah instrumen inklusi jika memberi kesempatan kepada anak dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun pendidikan dapat menjadi reproduksi ketimpangan jika kualitas sekolah sangat berbeda antarwilayah, akses digital timpang, dan pasar kerja lebih menghargai koneksi daripada kompetensi.

Keempat, demokrasi dan oligarki. Indonesia telah membangun demokrasi elektoral sejak Reformasi 1998. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan demokrasi tidak dikuasai uang, dinasti, patronase, dan oligarki. Pemilu penting, tetapi belum cukup. Demokrasi inklusif memerlukan partai

politik yang sehat, pembiayaan politik transparan, media independen, hukum adil, masyarakat sipil kuat, dan partisipasi warga yang bermakna.

Kelima, inovasi dan transformasi digital. Indonesia memiliki peluang besar dalam ekonomi digital dan AI. Namun inovasi membutuhkan ekosistem institusional yang sehat: perlindungan data, kompetisi adil, akses pembiayaan, pendidikan digital, riset, kebebasan akademik, dan regulasi yang tidak mematikan kreativitas. Tanpa itu, ekonomi digital dapat berubah menjadi konsentrasi kekuatan pada sedikit platform besar.

Dengan demikian, pelajaran utama bagi Indonesia adalah bahwa pembangunan harus diarahkan pada institusi inklusif: pemerataan kesempatan, kepastian hukum, kualitas pendidikan, kompetisi sehat, tata kelola sumber daya alam, reformasi birokrasi, dan penguatan demokrasi substantif.

26. Inti Argumen Buku dalam Alur Sederhana

Alur logika buku dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, kemakmuran bangsa bergantung pada insentif ekonomi masyarakat. Orang akan bekerja keras, berinvestasi, berinovasi, dan belajar jika mereka memiliki kesempatan dan jika hasil kerja mereka aman. Kedua, insentif tersebut dibentuk oleh institusi ekonomi. Ketiga, institusi ekonomi dibentuk oleh institusi politik karena politik menentukan siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat aturan. Keempat, jika kekuasaan politik terkonsentrasi pada elite sempit, elite akan menciptakan institusi ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri. Kelima, jika kekuasaan politik tersebar dan dibatasi, peluang lebih besar muncul bagi institusi ekonomi yang inklusif. Keenam, institusi inklusif mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Ketujuh, institusi ekstraktif dapat menghasilkan pertumbuhan sementara, tetapi cenderung gagal dalam jangka panjang karena menghambat creative destruction dan memperlemah legitimasi.

Dengan alur ini, buku tersebut menjelaskan sejarah panjang berbagai bangsa. Negara maju bukan maju karena nasib geografis atau superioritas budaya, melainkan karena berhasil membangun institusi yang relatif lebih

inklusif. Negara miskin bukan miskin karena rakyatnya malas atau bodoh, melainkan karena terjebak dalam struktur institusional yang tidak memberi kesempatan luas dan terus mereproduksi ekstraksi.

27. Pelajaran Manajerial dari *Why Nations Fail*

Walaupun buku ini berbicara tentang negara, gagasannya juga relevan bagi manajemen organisasi. Organisasi dapat memiliki institusi internal yang inklusif atau ekstraktif. Organisasi inklusif memberi ruang partisipasi, meritokrasi, pembelajaran, inovasi, dan akuntabilitas. Organisasi ekstraktif memusatkan keputusan pada elite kecil, menekan kritik, memberi promosi berdasarkan kedekatan, dan mengambil nilai dari anggota tanpa memberi kesempatan berkembang.

Dalam organisasi, creative destruction juga penting. Perusahaan yang terlalu melindungi model bisnis lama dapat gagal menghadapi inovasi. Elite internal yang menikmati status quo mungkin menolak transformasi digital, AI, atau perubahan proses kerja karena perubahan mengancam posisi mereka. Karena itu, organisasi yang adaptif perlu membangun institusi internal yang mendorong eksperimen, transparansi, kolaborasi, dan keberanian belajar.

Bagi perguruan tinggi, pesan buku ini juga penting. Kampus yang inklusif memberi ruang kebebasan akademik, riset, kolaborasi lintas disiplin, meritokrasi dosen, dan kesempatan belajar mahasiswa. Kampus yang ekstraktif hanya mengejar status formal, birokrasi, atau kepentingan elite institusional. Dalam era AI, perguruan tinggi harus menjadi institusi inklusif yang memperluas akses pengetahuan dan membangun kapasitas berpikir kritis.

28. Kekuatan Buku

Kekuatan utama *Why Nations Fail* terletak pada kemampuannya menyatukan sejarah panjang dengan teori sederhana namun kuat. Buku ini mudah dipahami karena menggunakan banyak kisah historis, tetapi tetap memiliki argumen akademik yang jelas. Pembaca diajak melihat bahwa

pembangunan bukan sekadar urusan ekonomi teknis, melainkan urusan kekuasaan, konflik, dan institusi.

Kekuatan lainnya adalah kritik terhadap penjelasan deterministik. Buku ini menolak anggapan bahwa negara miskin ditakdirkan miskin karena iklim, budaya, agama, atau ras. Ini adalah pesan penting secara moral dan politik. Jika kemiskinan disebabkan institusi, maka perubahan mungkin dilakukan. Tidak ada bangsa yang secara alamiah ditakdirkan gagal.

Buku ini juga kuat karena menunjukkan bahwa elite sering menjadi penghambat pembangunan bukan karena tidak pintar, tetapi karena memiliki kepentingan. Dengan demikian, reformasi pembangunan harus memperhatikan politik kekuasaan.

29. Keterbatasan Buku

Namun buku ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, kategori inklusif dan ekstraktif kadang terlalu biner. Dalam kenyataan, banyak negara memiliki campuran institusi inklusif dan ekstraktif. Sebuah negara dapat memiliki pasar relatif terbuka tetapi politik terbatas. Negara lain dapat demokratis tetapi ekonominya oligarkis. Oleh karena itu, analisis harus lebih nuansatif.

Kedua, buku ini kurang mendalam membahas variasi kapitalisme modern. Negara Skandinavia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Singapura, Cina, dan Korea Selatan memiliki bentuk institusi yang berbeda, tetapi semuanya memiliki elemen keberhasilan tertentu. Tidak semua jalur pembangunan sama.

Ketiga, buku ini relatif kurang membahas aspek global seperti kolonialisme berkelanjutan, rantai nilai global, dominasi korporasi multinasional, sistem utang internasional, dan perubahan iklim. Padahal faktor-faktor ini juga memengaruhi kemampuan negara berkembang membangun institusi inklusif.

Keempat, buku ini tidak memberikan resep kebijakan yang mudah. Para penulis dengan sengaja menunjukkan bahwa tidak ada formula sederhana untuk membangun institusi inklusif. Perubahan bergantung pada sejarah,

konflik politik, koalisi sosial, dan momentum kritis. Bagi pembuat kebijakan, ini bisa terasa kurang praktis.

Namun keterbatasan tersebut tidak mengurangi kontribusi utama buku. Justru buku ini mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa dipahami dengan resep teknokratis sederhana.

30. Kesimpulan Utama

Why Nations Fail menyampaikan pesan mendasar: bangsa gagal bukan terutama karena kekurangan sumber daya, budaya yang salah, iklim yang buruk, atau pemimpin yang tidak tahu teori ekonomi. Bangsa gagal karena institusi politik dan ekonomi mereka bersifat ekstraktif. Institusi tersebut memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada elite, melemahkan hak masyarakat, membatasi kesempatan, menghambat inovasi, dan menciptakan lingkaran kemiskinan.

Sebaliknya, bangsa berhasil ketika membangun institusi inklusif. Institusi ini tidak sempurna, tetapi cukup terbuka untuk memungkinkan partisipasi luas, perlindungan hak, kompetisi, inovasi, dan akuntabilitas. Kemakmuran berkelanjutan membutuhkan masyarakat yang memiliki kesempatan untuk menggunakan bakatnya dan negara yang tidak menjadi alat perampasan elite.

Buku ini juga mengajarkan bahwa pembangunan adalah proses politik. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh modal dan teknologi, tetapi oleh siapa yang mengendalikan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dibatasi. Inovasi memerlukan kebebasan; investasi memerlukan kepastian; pendidikan memerlukan kesempatan; pasar memerlukan hukum; dan negara memerlukan akuntabilitas.

Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, pelajaran terbesar dari buku ini adalah pentingnya membangun institusi yang memperluas kesempatan rakyat. Reformasi ekonomi harus berjalan bersama reformasi politik, hukum, birokrasi, pendidikan, dan tata kelola. Pembangunan yang hanya memperbesar angka pertumbuhan tanpa memperbaiki institusi dapat menjadi rapuh dan timpang. Pembangunan yang inklusif harus

memastikan bahwa kekayaan nasional tidak hanya diekstraksi oleh sedikit orang, tetapi menjadi dasar bagi kemakmuran bersama.

31. Glosarium Singkat

Institusi

Aturan formal dan informal yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk hukum, norma, organisasi, hak milik, sistem politik, dan mekanisme ekonomi.

Institusi inklusif

Institusi yang membuka partisipasi luas, melindungi hak, memberi kesempatan, membatasi kekuasaan, dan mendorong inovasi.

Institusi ekstraktif

Institusi yang dirancang untuk mengambil kekayaan dari mayoritas masyarakat demi keuntungan elite sempit.

Creative destruction

Proses inovasi yang menciptakan teknologi dan struktur ekonomi baru sekaligus menggantikan struktur lama.

Critical juncture

Titik balik sejarah yang membuka peluang perubahan institusional besar.

Rule of law

Prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua pihak, termasuk penguasa, secara adil dan konsisten.

Oligarki

Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada kelompok kecil elite.

Vicious circle

Lingkar kejahatan institusional ketika institusi ekstraktif terus mereproduksi kekuasaan dan ketimpangan.

Virtuous circle

Lingkar kebaikan ketika institusi inklusif memperkuat partisipasi, akuntabilitas, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Rent-seeking

Upaya memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan, monopoli, izin, atau privilese, bukan melalui produktivitas.

32. Daftar Pustaka Singkat

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). Reversal of fortune: Geography and institutions in the making of the modern world income distribution. *Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1231–1294. <https://doi.org/10.1162/003355302320935025>

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). *Economic origins of dictatorship and democracy*. Cambridge University Press.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.

Versi ini dapat langsung dipakai sebagai bahan ajar, handout kuliah, atau pengantar diskusi tentang ekonomi politik kelembagaan dan pembangunan nasional.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 3 Juli 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a474c08-f46c-83ec-b7e7-f56abb1be10d>